



**KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK
(Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)**

NAMA : ANNISA THURFAH ASILAH

NIM : 1710611289



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2021**

**KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK
(Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)**

Disusun Oleh:

**ANNISA THURFAH ASILAH
1710611289**

**Tugas Akhir Ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Annisa Thurfah Asilah

NIM : 1710611006

Tanggal : 04 Februari 2021

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/~~ARTIKEL JURNAL/~~TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

SEBAGAI CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama : Annisa Thurfah Asilah
NPM : 1710611289
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/~~Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK
Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba**

Jakarta, 04 Februari 2021



Annisa Thurfah Asilah



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Tugas Akhir diajukan oleh :

Nama : Annisa Thurfah Asilah

NIM : 1710611289

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK
(Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU
Minerba)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H

Ketua

Siti Nurul Intan, S.H., M. Kn

Anggota 1

Heru Sugiyono, S.H., M.H

Anggota 2



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

Kepala Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 04 Februari 2021



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL JURNAL

JUDUL :

KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK
(Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba

ANNISA THURFAH ASILAH

1710611289

Artikel jurnal ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Jakarta, 04 Februari 2021

Mengetahui,

Dekan

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

NIP. 196706081994031005

Kepala Program Studi

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

NIP. 198701022019031006

Pembimbing

Heru Sugiyono, S.H., M.H

NIP. 217121294

Abstrak

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 banyak kalangan yang menyoroti penambahan Pasal 169A yang menjelaskan mengenai jaminan perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya. Namun sebenarnya jaminan perpanjangan tersebut tidak serta merta diberikan melainkan melalui pertimbangan yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai bagaimana kepastian hukum pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan bagaimana perlindungan hukum bagi KK dan PKP2B apabila permohonan perpanjangan operasi kontrak/perjanjian nya ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kekaburan norma yang menimbulkan belum adanya kepastian hukum dalam Pasal 169A UU Minerba yang mengatur IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Ketentuan mengenai aturan tersebut harus dijelaskan menggunakan frasa yang jelas dan tegas dalam Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan pelaksana UU Minerba agar tidak menimbulkan multi tafsir guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha pertambangan.

Kata Kunci: Minerba, Izin Usaha, Pertambangan.

Abstract

After the promulgation of Law Number 3 of 2020 many people highlighted the addition of Article 169A which explains the guarantee of extension through special mining business license (IUPK) for contract of work (KK) and work agreement for coal mining exploitation (PKP2B) which will expire. However actually the guarantee of extension is not automatically given but through considerations mandated by the law. The formulation of the problem raised in this study is about the legal certainty of granting IUPK as a continuation of contract/agreement operations and how legal protection for KK and PKP2B if the application for extension of contract/agreement is rejected by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). This study uses a normative juridical research method through literature study with a statutory approach. The result of this study indicate a vagueness of norms which results in the absence of legal certainty in Article 169A of the Minerba Law which regulates IUPK as a continuation of contract/agreement operations. The provisions regarding these rules must be explained using clear and firm phrases in the Government Regulation as derivative rules for implementing the Minerba Law so as not to cause multiple interpretations in order to provide the legal certainty and protection for mining business actors.

Key words: *Minerba, Business License, Mining.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Artikel Jurnal yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)” dengan baik.

Artikel Jurnal ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan oleh keluarga, sahabat, dan dosen pembimbing yang selama proses pembuatan Artikel Jurnal hingga Sidang Tugas Akhir selalu berada di sisi penulis untuk memberikan semangatnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Purnawarman Hamli, Masjida Hamzah, Reslanda, dan Muhammad Reza selaku orang tua dan saudara kandung penulis atas segala yang telah diberikan untuk penulis hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan S1 penulis dengan baik;
2. Heru Sugiyono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berbesar hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran beliau untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan Artikel Jurnal dan mendapat hasil akhir yang terbaik;
3. Ivan Fasyah, Lubna Tabriz Sulthanah, Adinda Permana Putri, Muhammad Hadi Alhadar, dan Sela Nopela sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan yang telah melewati berbagai keadaan dan tetap bersama penulis selama 3,5 tahun ini;
4. Princesza Feyga, Windy Rachmadhita, Hanifah Febri, Thifa Prahasyila, Fadilla Prashanty, dan Marsa Safira sahabat terbaik yang mengikuti perkembangan hidup penulis dari sekolah menengah pertama (SMP) dan tetap bersama penulis hingga saat ini;
5. Teman-teman Advopena dan Biro Kominfo;
6. Seluruh teman-teman BEM Fakultas Hukum Kabinet Sivitas dan Padma Arutala;

7. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
8. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
9. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa artikel jurnal ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah disusun dengan upaya yang maksimal, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk Artikel Jurnal ini. Semoga Artikel Jurnal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jakarta, 04 Febuari 2021

Annisa Thurfah Asilah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II	
A. Litelature Review	5
B. Metode Penelitian.....	6
BAB III	
A. Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	9
B. Perlindungan Hukum bagi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) apabila Permohonan Perpanjangan melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	15
BAB IV	
A. Kesimpulan.....	22
B. Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Kartu Monitoring Tugas Akhir

Lampiran 2 - Hasil Turnitin

Lampiran 3 – Berita Acara Sidang Tugas Akhir

Lampiran 3 - Lembar Catatan Koreksi

Lampiran 4 - Rekapitulasi Nilai Ujian

Lampiran 5 - Bukti Submit/LOA/Publish

Lampiran 6 - Surat Pernyataan